

BAB IV: PENUTUP DAN KESIMPULAN

4.1. Rangkuman

Krisis diplomatik Qatar yang terjadi sejak tahun 2017 silam merupakan sebuah fenomena politik yang banyak disorot oleh dunia internasional. Krisis tersebut berawal sejak Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan hubungan diplomatiknya dengan Qatar pada 5 Juni 2017. Keputusan Arab Saudi tersebut kemudian diikuti oleh beberapa negara Arab lainnya yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir. Selain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, Arab Saudi juga memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar dari segala sektor yang menghubungkan Arab Saudi dengan Qatar, baik sektor darat, laut maupun udara. Seperti halnya pemutusan hubungan diplomatik, kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut juga diikuti oleh ketiga negara Arab diatas, dimana mereka juga menerapkan hal yang sama terhadap Qatar persis seperti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadapnya. Sebenarnya keempat negara tersebut telah bersedia untuk mengakhiri krisis diplomatik yang terjadi, hanya saja hal itu bisa dilakukan jika Qatar sanggup memenuhi 13 tuntutan yang mereka ajukan kepadanya, yang beberapa diantaranya adalah menghentikan aliran dana terhadap organisasi teroris, mengakhiri hubungan dengan *Ikhwanul Muslimin* dan meminimalisir hubungan diplomatik dengan Iran. Qatar lantas menolak secara keras tuntutan tersebut, terutama tuntutan yang

berisikan tentang menghentikan aliran dana kepada organisasi terorisme, pemerintah Qatar menganggap tuntutan tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak bisa diterima. Menanggapi penekanan yang datang terhadap dirinya dari beberapa negara Teluk tersebut, Qatar tentunya tidak tinggal diam, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 1, bahwa pada awal-awal diterapkannya kebijakan tersebut, Qatar mengalami tingkat kerugian yang signifikan dari segi finansial, dimana jumlahnya mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Berdasarkan hal itu, Qatar kemudian mengupayakan agar Arab Saudi dan teman-temannya bersedia untuk membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan blokade yang mereka terapkan terhadap negara tersebut. Namun hal itu tidak pernah digubris oleh Arab Saudi dan teman-temannya. Satu-satunya cara bagi Qatar untuk menaikkan kembali taraf perekonomiannya adalah dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya yaitu, LNG, minyak bumi dan gas alam serta memasifkan kerja sama dengan negara-negara yang masih menjalin hubungan diplomatik dengannya, seperti Iran, Turki, Oman dan beberapa negara Eropa untuk menopang kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Qatar. Namun tentu saja, jika ditinjau dari segi efektifitas, hubungan kerja sama antara Qatar dengan Arab Saudi dan beberapa negara lain yang melakukan blokade terhadapnya saat ini, jauh lebih efektif dibandingkan dengan apa yang Qatar lakukan bersama negara-negara yang saat ini membantunya karena dilanda blokade tersebut. Hal itu

sebagaimana dijelaskan di bab 2, bahwa kerja sama antara Qatar dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam bidang ekonomi menghasilkan 86 persen keuntungan dari total seluruh kerja sama ekonomi yang dilakukan Qatar dengan dengan negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah. Selain berdampak pada sektor ekonomi, pada bab 2 juga telah dijelaskan secara komprehensif terkait dampak dari kebijakan blokade Qatar tersebut terhadap beberapa sektor lainnya, yang diantaranya adalah politik, akomodasi dan transportasi serta kemanusiaan.

Dampak pada sektor politik dapat dilihat dari keikutsertaan beberapa negara-negara Teluk dan Arab terhadap Arab Saudi dalam memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar, sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 5 negara Arab yang mengikuti Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar, dua diantaranya adalah negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain, sedangkan tiga lainnya adalah Yaman, Libya dan Mesir. Selain itu, klaim negara tersebut terhadap Qatar sebagai negara yang mendanai organisasi teroris juga menimbulkan *stereotype* yang buruk bagi Qatar dalam dunia internasional. Dampak yang selanjutnya adalah pada bidang transportasi dan akomodasi, dimana pada bidang ini, masyarakat Qatar dibatasi mobilitasnya untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain melalui sektor darat, laut dan udara, hal ini jelas sangat merugikan masyarakat Qatar, mengingat

sebagian besar masyarakat Qatar adalah muslim, dan secara otomatis akan sangat sulit bagi mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji disebabkan oleh adanya blokade tersebut. Dampak yang terakhir dapat dilihat pada sektor kemanusiaan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 bahwa OHCHR sendiri telah mengindikasikan adanya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Qatar akibat adanya kebijakan blokade tersebut, diantaranya adalah pembatasan terhadap kebebasan, dimana warga Qatar dilarang untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab, lalu pemisahan antara sanak keluarga dan kerabat, dimana setelah diberlakukannya kebijakan blokade tersebut, Arab Saudi dan kedua negara Teluk di atas mengharuskan bagi warga Qatar yang tinggal di negara mereka agar meninggalkan negara-negara tersebut dalam jangka waktu 14 hari, hal itu jelas merugikan warga Qatar, terlebih bagi mereka yang telah melakukan pernikahan campuran. Dampak kemanusiaan ini tidak hanya berlaku bagi warga Qatar saja, beberapa warga Saudi juga terkena imbas dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh negaranya tersebut. Sebagaimana contoh yang telah ada pada bab 2 dimana terdapat seorang wanita Saudi bernama Fatimah yang menikah dengan laki-laki Qatar dan telah memiliki 4 orang anak dengan terpaksa harus berpisah dengan suaminya disebabkan oleh kebijakan blokade tersebut. Seiring berjalannya waktu, kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar tersebut akhirnya menuai respon dari berbagai pihak, diantaranya adalah PBB

yang diwakili oleh ODHCR yang mengecam keras kebijakan blokade Qatar yang diterapkan oleh Arab Saudi, karena telah melanggar nilai-nilai HAM yang dibawa oleh PBB. Selanjutnya terdapat pula dua negara di Timur Tengah yang berupaya untuk netral dan menjadi penengah bagi keduanya, adalah Kuwait dan Oman yang hingga saat ini menyatakan sikap netral mereka terkait konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar. Namun keduanya berbeda dalam mengimplementasikan kenetralannya terhadap kedua belah pihak, disatu sisi, Kuwait merupakan negara yang berambisi kuat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua negara melalui jalur mediasi yang disediakannya bersama dengan Amerika Serikat. Disisi lain, Oman lebih terlihat tidak mau ikut campur dalam permasalahan tersebut, negara itu hanya berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan keduanya, hal ini sebagaimana komitmen dalam politik luar negeri Oman itu sendiri yang melarang adanya intervensi bagi permasalahan di negara lain.

Seperti halnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara secara umum, kebijakan blokade Arab Saudi terhadap Qatar ini tentunya memiliki beberapa faktor. Jika ditinjau dari perspektif *Decision Making* sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3, faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam membuat kebijakan blokade tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mempertimbangkan bagaimana keadaan domestik suatu negara mendorong negara tersebut untuk

mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan internal negara tersebut. Seperti halnya Arab Saudi, dimana internal Kerajaan Saudi telah mendorong negara itu untuk mengeluarkan kebijakan blokade tersebut, dimana mereka memiliki dendam lama terhadap Qatar yang sudah dipendam sejak tahun 1995. Sedangkan pada faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Arab Saudi dalam memberlakukan kebijakan blokade tersebut dapat dilihat dari keadaan internasionalnya, dalam hal ini adalah kawasan Timur Tengah itu sendiri. Jika ditinjau dari faktor eksternal terdapat tiga faktor utama yang membuat Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar. Pertama adalah hubungan antara Arab Saudi dengan Iran, dimana keduanya sudah memiliki hubungan sejak lama, terhitung saat pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani menggantikan posisi ayahnya sebagai emir Qatar pada tahun 1995, dimana pada masa itu keduanya sepakat untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan gas alam cair dari *Reservoir* yang terletak di lepas pantai North Field. Semenjak saat itu, hubungan antara Qatar dan Arab Saudi sudah mulai renggang, karena Qatar telah melakukan kerja sama dengan negara yang dianggap oleh Arab Saudi sebagai musuh besar. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa kedekatan antara Qatar dan Iran saat ini menjadi salah satu faktor pemicu utama bagi Arab Saudi untuk melakukan blokade terhadap Qatar. Kedua adalah, hubungan antara Qatar dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin*. Sudah menjadi rahasia umum jika kedekatan Qatar dan *Ikhwanul Muslimin*

tidak dapat ditutup-tutupi lagi, banyaknya tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang berhijrah ke Qatar menjadi salah satu bukti kongkrit akan kedekatannya dengan organisasi tersebut. Sebut saja Yusuf Qordhowi, seorang tokoh *Ikhwanul Muslimin* dari Mesir yang saat ini menjadi ulama terkemuka di Qatar. kedekatan Qatar dan *Ikhwanul Muslimin* ini membuat Arab Saudi marah, karena Arab Saudi menganggap bahwa organisasi tersebut adalah teroris, secara tidak langsung Arab Saudi menuduh Qatar mendukung organisasi teroris dengan menampung tokoh-tokoh *Ikhwanul Muslimin* di negaranya. Faktor yang ketiga adalah, adanya dukungan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti UEA, Bahrain dan Mesir yang juga mengikuti jejak Arab Saudi dalam memberlakukan blokade terhadap Qatar.

4.2. Proyeksi Kedepan

Menurut penulis krisis diplomatik terjadi pada negara-negara anggota GCC ini akan berlangsung lama dan sulit untuk diselesaikan. Sebagaimana diketahui bahwa kedua belah pihak baik Arab Saudi dan Qatar masing-masing tidak mau berkompromi dalam menyelesaikan hal ini, 13 tuntutan yang diajukan Arab Saudi terhadap Qatar sebenarnya merupakan proyeksi Arab Saudi untuk bisa mengintervensi negara tersebut, agar dirinya menjadi satu-satunya negara yang paling besar powernya di Timur Tengah, dan sebagai sebuah negara yang berdaulat, Qatar tentu menolak 13 tuntutan yang diajukan Arab Saudi tersebut. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa

keduanya memiliki ego yang tinggi, dan tidak ada yang bersedia untuk mengalah antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan penulis beranggapan bahwa krisis diplomatik yang terjadi di Qatar ini akan sangat sulit untuk diselesaikan.

4.3. Saran Penelitian

Terkait saran penelitian, penulis mengajukan beberapa opsi kepada para analis yang ingin meneliti topik yang sama dengan apa yang dibahas oleh penulis saat ini. Opsi-opsi tersebut antara lain adalah:

- a. Pengkajian secara teoritis terkait bagaimana cara agar krisis diplomatik Qatar ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori resolusi konflik.
- b. Pengkajian terkait perbandingan keadaan Qatar sebelum dan setelah diblokade oleh Arab Saudi secara komprehensif.
- c. Pengkajian terkait kelanjutan dari Krisis Diplomatik Qatar 2017.